



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUHKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYATIMUR ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kerahayahan.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Lembaga Keramayakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Sekretariat Gampong adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Gampong dan kesekretariatan Tuha Peut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II STANDAR BIAYA DI GAMPONG

Pasal 2

- (1) Standar biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak secara nasional, maka Standar biaya yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Keuchik dapat mengatur sendiri melalui Peraturan Keuchik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Februari 2024 m
26 Rajab 1445 H

of PJ. BUPATI ACEHJAYA, *Pr*

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Februari 2024 m
26 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, *of*

TEDKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN
 GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH
 JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
 DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA | SUMBERDANA |
|-----|---|-------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong | | | |
| | - Keuchik | orang/bulan | Rp. 2.476.000 | ADG/Sumber Lain |
| | - Sekretaris Gampong | orang/bulan | Rp. 2.224.420 | ADG/Sumber Lain |
| | - Kepala Urusan | orang/bulan | Rp. 1.250.000 | ADG/Sumber Lain |
| | - Kepala Seksi | orang/bulan | Rp. 1.500.000 | ADG/Sumber Lain |
| | - Kepala Dusun | orang/bulan | Rp. 1.250.000 | ADG/Sumber Lain |
| | b. Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan setiap bulan: | | | |
| | - Keuchik | orang/bulan | Rp. 1.000.000 | ADG/Sumber Lain |
| | - Sekretaris Gampong | orang/bulan | Rp. 800.000 | ADG/Sumber Lain |
| | - Kepala Urusan | orang/bulan | Rp. 600.000 | ADG/Sumber Lain |
| | - Kepala Seksi | orang/bulan | Rp. 500.000 | ADG/Sumber Lain |
| | - Kepala Dusun | orang/bulan | Rp. 500.000 | ADG/Sumber Lain |
| | c. Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong (Keuchik) diberikan maksimal sebagai berikut: | | | |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000. | orang/bulan | Rp. 500.000 | ADG/Sumber Lain |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.750.000.000 – Rp.1.000.000.000. | orang/bulan | Rp. 600.000 | ADG/Sumber Lain |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.1.000.000.000 | orang/bulan | Rp. 800.000 | ADG/Sumber Lain |
| | d. Besaran Honorarium Koordinator Pelaksana Keuangan Gampong (Sekretaris Gampong) diberikan maksimal sebagai berikut: | | | |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000 | orang/bulan | Rp. 400.000 | ADG/Sumber Lain |

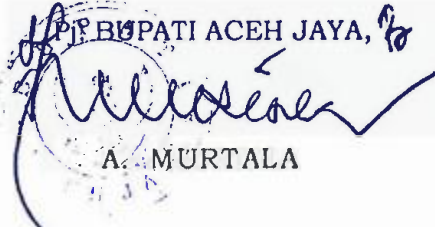
| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA | SUMBERDANA |
|-----|--|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000- Rp1.000.000.000 | orang/bulan | Rp. 550.000 | ADG/Sumber Lain |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000 | orang/bulan | Rp. 750.000 | ADG/Sumber Lain |
| e. | Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut: | | | |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000 | orang/bulan | Rp. 350.000 | ADG/Sumber Lain |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000- Rp1.000.000.000 | orang/bulan | Rp. 450.000 | ADG/Sumber Lain |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000 | orang/bulan | Rp. 650.000 | ADG/Sumber Lain |
| f. | Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kasi dan Kaur Selain Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut: | | | |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000 | orang/bulan | Rp. 300.000 | ADG/Sumber Lain |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000 | orang/bulan | Rp. 400.000 | ADG/Sumber Lain |
| | Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000 | orang/bulan | Rp. 500.000 | ADG/Sumber Lain |
| g. | Tunjangan bagi Tuha Peut | | | |
| | - Ketua Tuha Peut | orang/bulan | Rp. 650.000 | ADG/PBH/PAG |
| | - Anggota Tuha Peut | orang/bulan | Rp. 450.000 | ADG/PBH/PAG |
| 2. | Operator layanan terintegrasi (Epdskel. Prodeskel, SIGAP, PPID, Agam Pelandok dan aplikasi lainnya) | orang/bulan | Rp. 750.000 | DD |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA | SUMBER DANA |
|-----|--|-------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Honorarium Operator Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Gampong | orang/bulan | Rp. 250.000 | DD |
| 4. | a. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Keuchik | orang/bulan | Rp. 14.580 | DD |
| | b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Gampong | orang/bulan | Rp. 14.580 | DD |
| 5. | Tenaga Keagamaan Gampong | | | |
| | a. Imum Sagoe Gampong | orang/bulan | Rp. 800.000 | DD/Sumber Lain |
| | b. Pentajhiz Mayat | orang/bulan | Rp. 600.000 | DD/Sumber Lain |
| | c. Balee Seumeubeut | | | |
| | - Pimpinan | orang/bulan | Rp. 600.000 | DD/Sumber Lain |
| | - Guru | orang/bulan | Rp. 400.000 | DD/Sumber Lain |
| | d. TPA | | | |
| | - Pimpinan | orang/bulan | Rp. 500.000 | DD/Sumber Lain |
| | - Guru | orang/bulan | Rp. 400.000 | DD/Sumber Lain |
| | e. Masjid | | | |
| | - Imam | orang/bulan | Rp. 600.000 | DD/Sumber Lain |
| | - Bilal | orang/bulan | Rp. 500.000 | DD/Sumber Lain |
| | - Khadam | orang/bulan | Rp. 400.000 | DD/Sumber Lain |
| | f. Meunasah | | | |
| | - Imam | orang/bulan | Rp. 300.000 | DD/Sumber Lain |
| | - Bilal | orang/bulan | Rp. 250.000 | DD/Sumber Lain |
| 6. | Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Gampong | | | |
| | a. PAUD/TK Gampong | | | |
| | - Pimpinan/Guru | orang/bulan | Rp. 700.000 | DD |
| | - Guru | orang/bulan | Rp. 600.000 | DD |
| | - Bunda PAUD Gampong | orang/bulan | Rp. 400.000 | DD |
| | b. Kader Posyandu | | | |
| | - Ketua | orang/bulan | Rp. 150.000 | DD |
| | - Anggota | orang/bulan | Rp. 125.000 | DD |
| | c. Kader Gampong Siaga | | | |
| | - Ketua | orang/bulan | Rp. 150.000 | DD |
| | - Anggota | orang/bulan | Rp. 100.000 | DD |
| | d. Kader Posbindu PTM | | | |
| | - Ketua | orang/bulan | Rp. 150.000 | DD |
| | - Anggota | orang/bulan | Rp. 100.000 | DD |
| | e. Kader BKB | | | |
| | - Ketua | orang/bulan | Rp. 150.000 | DD |
| | - Anggota | orang/bulan | Rp. 100.000 | DD |
| | f. Juru Malaria Gampong | orang/bulan | Rp. 125.000 | DD |
| | g. Bidan Malaria Gampong | orang/bulan | Rp. 300.000 | DD |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA | SUMBERDANA |
|-----|---|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Beasiswa S-1 Program satu Gampong satu Sarjana untuk 2 (dua) semester Universitas/ Perguruan Tinggi di Kab. Aceh Jaya, untuk masyarakat miskin dan kurang mampu | orang/tahun | Rp. 4.000.000 | DD |
| 8. | Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) | orang/bulan | Rp. 250.000 | DD/Sumber Lain |
| 9. | Peningkatan Kapasitas Kader | Per Kegiatan | Rp. 500.000 | DD |
| 10. | Honorarium Ketua Pemuda | orang/bulan | Rp. 300.000 | DD/Sumber Lain |
| 11. | Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Gampong | | | |
| | a. Ketua (Keuchik) | orang/bulan | Rp. 750.000 | DD/ADG/DBH/PAG |
| | b. Pelaksana (Kaur terkait) | orang/bulan | Rp. 600.000 | DD/ADG/DBH/PAG |
| | c. Ketua Regu | orang/bulan | Rp. 500.000 | DD/ADG/DBH/PAG |
| | d. Anggota | orang/bulan | Rp. 400.000 | DD/ADG/DBH/PAG |
| 12. | Penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan dan acara resmi lainnya | | | |
| | a. Narasumber/pengajar/ fasilitator | | | |
| | - S3 Dalam Daerah | orang/jam | Rp. 350.000 | DD/ADG |
| | - S2 Dalam Daerah | orang/jam | Rp. 300.000 | DD/ADG |
| | - D4/S1 Dalam Daerah | orang/jam | Rp. 250.000 | DD/ADG |
| | - S3 Luar Daerah | orang/jam | Rp. 450.000 | DD/ADG |
| | - S2 Luar Daerah | orang/jam | Rp. 400.000 | DD/ADG |
| | - D4/S1 Luar Daerah | orang/jam | Rp. 350.000 | DD/ADG |
| | - Tenaga Profesi/Instruktur | orang/jam | Rp. 200.000 | DD/ADG |
| | b. Moderator | orang/kali | Rp. 300.000 | DD/ADG |
| | c. Pembawa Acara | orang/kali | Rp. 150.000 | DD/ADG |
| | d. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an/Doa | orang/kali | Rp. 150.000 | DD/ADG |
| | e. Uang saku peserta | orang/hari | Rp. 100.000 | DD/ADG |
| | f. Panitia Pelaksana | | | |
| | - Penanggung jawab | orang/kali | Rp. 300.000 | DD/ADG |
| | - Ketua | orang/kali | Rp. 250.000 | DD/ADG |
| | - Sekretaris | orang/kali | Rp. 200.000 | DD/ADG |
| | - Anggota | orang/kali | Rp. 150.000 | DD/ADG |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA | SUMBER DANA |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Konsumsi Rapat | | | |
| | -Makan | orang/kali | Rp. 35.000 | DD/ADG/DBH/PAG |
| | -Snack | orang/kali | Rp. 10.000 | DD/ADG/DBH/PAG |
| 14. | Kendaraan Dinas roda dua 125 s/d 150 cc | 1 unit | Rp. 25.000.000 | APBG (Selain DD) |
| | Kendaraan Dinas roda dua 100 s/d 125 cc | 1 unit | Rp. 19.000.000 | APBG (Selain DD) |
| 15. | Kegiatan Pembinaan Adat Istiadat dalam Gampong | per kegiatan | Rp. 10.000.000 | DD/Sumber Lain |
| 16. | Renovasi Rumah Duafa | 1 Unit | Rp. 10.000.000 | DD |
| 17. | PMT- AS Anak PAUD | | | |
| | a. Balita | orang/kali | Rp. 20.000 | DD |
| | b. Bumil | orang/kali | Rp. 30.000 | DD |
| | c. Lansia | orang/kali | Rp. 30.000 | DD |
| 18. | Operasional dan Administrasi PKK | per tahun | Rp. 10.000.000 | DD |
| 19. | Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional | per tahun | Rp. 10.000.000 | DD |
| 20. | Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam | per tahun | Rp. 10.000.000 | DD |
| 21. | Operasional Pelaksanaan Kegiatan Lomba Gampong | per kegiatan | Rp. 10.000.000 | DD |
| 22. | Penyediaan Pojok Baca | per kegiatan | Rp. 3.000.000 | DD |
| 23. | Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Tahun 2024 | | | |
| | a. Honorarium Panitia Pemilihan Keuchik (P2P) dan Panitia Pemilih (P2P) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS): | | | |
| | - Ketua | orang/kegiatan | Rp. 500.000 | APBG |
| | - Sekretaris | orang/kegiatan | Rp. 400.000 | APBG |
| | - Anggota | orang/kegiatan | Rp. 350.000 | APBG |
| | a. Honorarium Petugas Keamanan | orang/kegiatan | Rp. 150.000 | APBG |
| | b. Honorarium Petugas Kebersihan | orang/kegiatan | Rp. 150.000 | APBG |
| | c. Biaya Pembuatan Kotak Suara | Per Unit | Rp. 200.000 | APBG |
| | d. Biaya Cetak Surat Suara | Per Lembar | Rp. 3.000 | APBG |
| | e. Biaya Bilik Suara | Per Unit | Rp. 100.000 | APBG |
| 24. | Publikasi/Media | Kegiatan | Rp. 1.000.000 | DD |
| 25. | Penyediaan Tong Sampah | Per Unit | Rp. 1.000.000 | DD |
| 26. | Sewa Domain Desa. id. | kegiatan | Rp. 55.500 | DD |
| 27. | PMT Penyuluhan Balita di Posyanu | | | |
| | a. Usia 6-11 bln | org/kali/Paket | Rp. 10.000 | DD |
| | b. Usia 12-23 bln | org/kali/Paket | Rp. 16.000 | DD |
| | c. Usia 24-59 bln | org/kali/Paket | Rp. 20.000 | DD |
| | d. Ibu Hamil | org/kali/Paket | Rp. 25.000 | DD |
| | e. Lansia | org/kali/Paket | Rp. 30.000 | DD |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA | SUMBERDANA |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | PMT Pemulihan Balita di Posyandu | | | |
| | a. Usia 6-11 bln | org/kali/Paket | Rp. 20.000 | DD |
| | b. Usia 12-23 bln | org/kali/Paket | Rp. 20.000 | DD |
| | c. Usia 24-59 bln | org/kali/Paket | Rp. 20.000 | DD |
| | d. Ibu Hamil | org/kali/Paket | Rp. 21.500 | DD |
| 29 | Dana Tanggap Darurat Gampong (DTD) | Tahun | Rp. 10.000.000 | DD |



 BUPATI ACEH JAYA, ¹⁰

 A. MURTALA